



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Lembar Disposisi

Index		SEGERA
No Agenda	31	Tanggal Penerimaan: Kamis, 17 Mei 2018 09:05
No Surat	401/DJAI.1/PW.01.06/05/2018	
Tgl Surat	Selasa, 15 Mei 2018	
Asal Surat	Mariam Fatima Barata SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	
Isi Singkat	Penyampaian Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan	

Diteruskan Kepada Yth.

- Sekretaris Itjen
- Inspektur I
- Inspektur II

- Inspektur III
- Inspektur IV
- ✓ *Randi*

Untuk

- Dijawab
- Ditindak lanjuti
- Ditanggapi tertulis
- Disiapkan makalah/sambutan atau presentasi sesuai tema
- Koordinasikan dengan
- Diwakili & laporkan hasilnya
- Dihadiri & dilaporkan hasilnya
- Disiapkan surat/memo dinas (intemal)
- Arsip
- Lain-lain
- Agendakan/Jadwalkan
- Diperhatikan
- Diberikan Penjelasan
- Diperbaiki
- Diproses sesuai ketentuan, Peraturan dan UU yang berlaku
- Diketahui
- Dibicarakan dengan saya

Disposisi

Monitor U/ yg belum mengirimkan.

17/5

Ivan Santoso



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

"Menunjang Masyarakat Informasi Indonesia"

KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Tlp. 021-3441491 Fax.021-3441491 www.kominfo.go.id

N O T A D I N A S

Nomor : 401 /DJAI.1/PW.01.06/05/2018

Kepada Yth : Plt. Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika
Perihal : Penyampaian Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 15 Mei 2018

Sehubungan dengan Nota Dinas Plt. Inspektur Jenderal Nomor: 68/IJ/PW.01.06/2018 perihal Permintaan Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan, dengan ini disampaikan konsep hasil Identifikasi/pemetaan terhadap potensi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi di lingkungan Ditjen Aplikasi Informatika dan strategi penanganannya.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mariam F. Barata

**IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN DITJEN APLIKASI INFORMATIKA**

No	Uraian benturan kepentingan	Pejabat/pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan
1	Pejabat/PPNS yang melakukan Penyidikan dan Penindakan kurang objektif dalam menangani tindak pidana pelanggaran UU ITE	Pimpinan dan Pejabat terkait serta PPNS	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, Vested Interest penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutahiran SOP Penyidikan dan Penindakan - Layanan pengaduan masyarakat - Mendorong Pejabat, PPNS yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidak-independensian - Keteladanan Pimpinan
2	Pejabat/PPNS dalam memberikan keterangan ahli Kasus Tindak Pidana Pelanggaran UU ITE bersifat subjektif	Pimpinan dan Pejabat terkait serta PPNS	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, Vested Interest penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutahiran SOP pemberian keterangan ahli - Layanan pengaduan masyarakat - Keteladanan Pimpinan

3	Pejabat/Tim penetapan Pemblokiran konten negatif	Pimpinan dan Pejabat terkait serta PPNS	Vested Interest penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutahiran SOP Pemblokiran konten bermuatan negatif - Penguatan mekanisme, supervisi dan penelaahan Tim Panel - Layanan pengaduan masyarakat Keteladanan Pimpinan
4	Pemberian domain .id tidak sesuai dengan prosedur	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, Vested Interest penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutahiran SOP Pemberian domain id - Layanan pengaduan masyarakat Keteladanan Pimpinan
5	Prioritas penetapan daerah pelaksanaan UMKM Go Online	Pimpinan dan Pejabat terkait	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, Vested Interest, penyalahgunaan wewenang, tekanan politik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemutahiran SOP penetapan UMKM go online - Layanan pengaduan masyarakat Keteladanan Pimpinan
6	Approval penggunaan nama	Pimpinan, Pejabat terkait dan	Hubungan afiliasi,	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan

	<p>.domain pemerintah (go.id dan desa.id) kurang objektif, akuntabel dan transparan</p>	<p>pertugas</p>	<p>keterbatasan SDM, Vested Interest, penyalahgunaan wewenang, tekanan politik</p>	<p>penerapan-SOP persetujuan permintaan penggunaan nama domain pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan pengaduan masyarakat - Peningkatan pelayanan - Keteladanan Pimpinan
<p>7</p>	<p>Penerbitan bukti terdaftar PSE tanpa melalui prosedur</p>	<p>Pimpinan, Pejabat terkait dan pertugas</p>	<p>Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM, Vested Interest, penyalahgunaan wewenang, tekanan politik</p>	<p>Pemutahiran SOP pendaftaran PSE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Layanan pengaduan masyarakat - Peningkatan pelayanan - Keteladanan Pimpinan